



KR GROUP
http://www.krjogja.com

Kedaulatan Rakyat

Suara Hati Nurani Rakyat

Terbit Sejak 27 September 1945



BERLANGGANAN
SCAN BARCODE



SABTU KLIWON

30 DESEMBER 2023 (16 JUMADILAKIR 1957 / TAHUN LXXIX NO 93)

HARGA RP 4.000 / 16 HALAMAN

Berskala Kalurahan di DIY 19 Kawasan Rawan Narkotika

YOGYA (KR) - Selama tahun 2023 terdapat 19 kawasan rawan narkotika berskala kalurahan di lima kabupaten/kota di DIY yang dipantau Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DIY. Ada delapan kriteria tambahan dan lima kriteria utama yang di-

jadikan dasar untuk menilai suatu wilayah tergolong rawan narkotika. BNNP DIY terus melakukan intervensi terhadap 19 kawasan rawan narkotika tersebut melalui Program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM).

"Berdasarkan data di

BNNP DIY, tercatat sebanyak 19 kawasan rawan narkotika dengan status waspada. Beragam upaya dilakukan untuk membuat wilayah tersebut aman dari peredaran narkotika, salah satunya dengan Program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM)," kata Kepala BNNP DIY Brigjen Pol Andi Fairan di kantornya, Jumat (29/12).

Dijelaskan, penentuan suatu kawasan rawan narkotika ditentukan berdasarkan sejumlah kriteria. Ada delapan kriteria tambahan dan lima kriteria utama yang dijadikan dasar untuk menilai suatu daerah. Misalnya apakah di daerah itu pernah ada kejahatan pengungkapan kasus narkoba, ditemukan bandar atau pengedar, dan faktor pendukung lainnya.

* Bersambung hal 7 kol 4



ARUS BALIK NAIK: Foto udara kendaraan melintas di Jalan Tol Trans Jawa Ruas Srandol-Jatingaleh, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (29/12/2023). PT Jasamarga Transjawa Tol mencatat volume kendaraan arus balik melalui wilayah Jateng via Gerbang Tol (GT) Kalikangkung Semarang menuju Jakarta per 25-27 Desember 2023 sebanyak 87.044 kendaraan atau naik 85,95 persen, dan untuk kendaraan menuju Semarang 75.801 kendaraan atau naik 62,97 persen dari lalu lintas normal biasanya.

DISESUAIKAN KEBIJAKAN NASIONAL UGM Kaji Ulang SE Larangan LGBT

YOGYA (KR) - Universitas Gadjah Mada (UGM) mengkaji ulang Surat Edaran (SE) Dekan Fakultas Teknik Nomor 2480112/UN1/FTK/I/KM/2023 yang melarang aktivitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di lingkungan fakultas itu. UGM berkomitmen 'review' kebijakan-kebijakan internal antara lain SE Dekan Fakultas Teknik No. 2480112/UN1/FTK/I/KM/2023.

"Merevisi kebijakan-kebijakan guna disesuaikan dengan kebijakan

nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM Prof Wening Udasmoro dalam keterangan resmi di Yogyakarta, Jumat (29/12).

Menurut Wening, UGM telah memiliki sikap dan posisi yang tegas bahwa sebagai institusi pendidikan bersandar pada nilai-nilai integritas, penghargaan pada keberagaman, penghormatan pada hak-hak dan kebebasan dasar. "Non-diskriminasi, dan menjamin perlindungan

pada pihak-pihak yang berada dalam posisi rentan yang telah diamanatkan dalam Konstitusi Indonesia dan berbagai UU tentang ratifikasi konvensi internasional terkait hak asasi manusia," katanya.

UGM, lanjut Wening, berkomitmen menjadikan kampus sebagai lingkungan yang aman, nyaman, kondusif, dan inklusif yang mengacu pada Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

* Bersambung hal 7 kol 1



Kejari
KR-Riyana Ekawati
Kepala BNNP DIY Brigjen Pol Andi Fairan (kedua kanan) memberikan keterangan kepada media.

MELALUI WAHYU SETIAWAN KPK Telusuri Keberadaan Harun Masiku

JAKARTA (KR) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelusuri keberadaan Harun Masiku, tersangka kasus dugaan suap penetapan anggota DPR RI periode 2019-2024. Terkait hal itu, KPK telah memanggil Wahyu Setiawan, anggota KPU RI periode 2017-2022 sebagai saksi dalam pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, melalui Wahyu Setiawan sebagai langkah penelusuran yang dilakukan KPK. "Selain menelusuri keberadaan Harun Masiku, KPK juga mendalami peristiwa pemberian suap oleh Harun kepada yang bersangkutan," jelasnya di Jakarta, Jumat (29/12).

Ali Fikri mengatakan, KPK memanggil Wahyu Setiawan sebagai saksi. "Dan kehadiran saksi ini didalam pengetahuannya antara lain terkait pendalaman informasi keberadaan tersangka HM (Harun Masiku), termasuk dikonfirmasi kembali atas peristiwa pemberian suap pada saksi saat itu," ungkapnya.

Sebelumnya, Wahyu Setiawan usai diperiksa penyidik KPK pada hari Kamis (28/12) mengaku belum pernah bertemu dengan Harun Masiku yang menjadi buronan KPK. Ia juga berharap tim penyidik KPK

* Bersambung hal 7 kol 1

MENLU KUNJUNGI MAHASISWA AFGHANISTAN DI UMY Pendidikan untuk Perempuan, Tentukan Masa Depan

BANTUL (KR) - Menlu Retno LP Marsudi menegaskan pentingnya aksesibilitas pendidikan bagi perempuan yang akan menentukan masa depan sebuah bangsa. Mengingat pendidikan adalah kunci bagi sebuah bangsa untuk berkembang dan menjadi maju.

"Pendidikan bagi perempuan menjadi pilar membangun masa depan bangsa yang lebih cerah. Indonesia telah memberikan keadilan dalam mengakses pendidikan, baik bagi pria maupun perempuan, karena kami percaya, perempuan memiliki peran yang signifikan dalam proses pembangunan bangsa," tandas Menlu Retno LP Marsudi ketika menyambangi mahasiswa Afghanistan penerima beasiswa Kemenlu Indonesia bekerja sama dengan PT Adaro



KR-Istimewa
Menlu Retno Marsudi menyampaikan paparan.

Energy Indonesia di Kampus UMY, Jumat (29/12).

Kehadiran Menlu untuk monitoring atas pemberian beasiswa dari Kemenlu terhadap mahasiswa Afghanistan di UMY. Hal ini disebutnya, sekaligus menjadi komitmen pemerintah Indonesia terhadap pendidikan dan kesetaraan gender secara umum. Selain mahasiswa

UMY, hadir pula mahasiswa Afghanistan dari UII dan Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan.

Retno menegaskan, Indonesia telah berperan aktif dalam agenda 'Women, Peace and Security', tidak hanya di lingkup Asia Tenggara, namun juga melalui PBB di lingkup global.

* Bersambung hal 7 kol 4

BERLAKU MULAI 28 DESEMBER 2023 Presiden Resmi Berhentikan Firlil Bahuri

JAKARTA (KR) - Presiden Joko Widodo telah meneken Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 129/P Tahun 2023 tentang Pemberhentian Firlil Bahuri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keppres tersebut ditandatangani Presiden Jokowi pada tanggal 28 Desember 2023 dan berlaku sesuai tanggal ditetapkan.

"Pada tanggal 28 Desember 2023, Presiden (Jokowi) telah menandatangani Keppres Nomor 129/P Tahun 2023 tentang Pemberhentian Firlil Bahuri sebagai Ketua Merangkap Anggota KPK Masa Jabatan 2019-2024. Keppres mulai berlaku pada tanggal ditetapkan," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana di Jakarta, Jumat (29/12).

Ari menyebutkan ada tiga pertimbangan utama da-

lam penerbitan Keppres tersebut. "Pertama, surat pengunduran diri Firlil Bahuri tertanggal 22 Desember 2023. Kedua, keputusan Dewan Pengawas (Dewas) KPK Nomor: 03/Dewan Pengawas/ Etik/12/2023 tanggal 27 Desember 2023.

* Bersambung hal 7 kol 1

SUNGGUH SUNGGUH TERJADI

● MINGGU 3 Desember 2023, kami berbandang ke kerabat di Banyuwangi disuguhi nasi oyek dari singkong, lodeh gori dan sambal tomat. Nikmat, non-gula dan nonkolesterol. Sampai di rumah, menu itu selalu saya tiru. (Aris Irianti, Senepo Timur 75 Kutoarjo 54212)-f

JADWAL SALAT	Zuhur	Asar	Magrib	Isya	Subuh
	11:44	15:10	18:01	19:17	04:00

Sabtu, 30 Desember 2023 Sumber: Kementerian Agama Kanwil Provinsi DIY

Analisis Demokrasi Kita

Halili Hasan MA

DARI sudut pandang politik, tahun 2023 merupakan tahun yang makin menegaskan bahwa demokrasi kita tidak sedang baik-baik saja. Rendahnya kredibilitas atas kelembagaan negara pada cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif, kini merambah lekas pada cabang kekuasaan yudikatif.

Putusan Mahkamah Konstitusi 90/PUU-XXI/2023 menjadi penanda paling benderang. Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan bahwa Ketua MK, Anwar Usman, telah melakukan pelanggaran etik berat dalam putusan tersebut akibat 'membuka diri terhadap intervensi pihak luar' dan memuluskan pencalonan keponakannya, Gibran Rakabuming Raka, untuk maju dalam Pilpres 2024 sebagai Calon Wakil Presiden.

* Bersambung hal 7 kol 4

Tidak Terbit
SEHUBUNGAN Hari Libur Nasional Tahun Baru Masehi 2024, maka SKH Kedaulatan Rakyat tidak terbit pada hari Minggu (31 Desember 2023) dan Senin (1 Januari 2024). KR akan mengunjungi pembaca kembali, Selasa (2 Januari 2024). Pembaca, pemasang iklan dan relasi harap maklum. (Penerbit)-f

PEMDA DIY SERAHKAN BKK DAN AIS TA 2024 Sultan: Prioritaskan Kebutuhan Masyarakat

YOGYA (KR) - Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta menyerahkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan (Danais) DIY Tahun Anggaran (TA) 2024 kepada kabupaten/kota dan kalurahan di Bangsal Kepatihhan, Kompleks Kantor Gubernur DIY, Danurejan Yogyakarta, Jumat (22/12).

Penyerahan BKK secara simbolis dilakukan oleh Wakil Gubernur DIY Paku Alam X mewakili Gubernur DIY Sri Sultan HB X.

Gubernur DIY Sri Sultan HB X dalam sambutan 'Kepyakan' Penyerahan BKK Danais yang dibacakan oleh Wakil Gubernur DIY Paku Alam X mengatakan, BKK Danais sudah selayaknya dipandang sebagai refleksi kerja kolaboratif antar-memangku kepentingan, dan kerja terpadu antarwilayah.

Terlebih, seluruh entitas pemerintahan di DIY, telah memulai proses Reformasi



KR-Istimewa
Wakil Gubernur DIY Paku Alam X secara simbolis menyerahkan BKK Danais DIY TA 2024.

Kalurahan, seiring pengesahan Peraturan Gubernur DIY Nomor 40 Tahun 2023, tentang Pelaksanaan Reformasi Kalurahan.

Selain itu, pemanfaatan dana keistimewaan juga harus memperhatikan Grand Desain Keistimewaan DIY. "Prioritaskan kegiatan pada sektor-sektor yang memang dibutuhkan dan dapat dirasa-

kan manfaatnya oleh masyarakat, terutama dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pengentasan pengangguran, mengurangi kesenjangan antarwilayah, dan mendorong investasi, melalui pemberdayaan masyarakat," kata Sultan.

Ditegaskan, BKK Danais jangan dianggap sebagai cadangan anggaran, atau ma-

lah menjadi tambahan beban kerja. "Jangan pula dianggap hanya milik Pemda DIY," kata Sultan.

Untuk itu, lanjut Sultan, semua kabupaten/kota harus turut handarbeni, sehingga BKK Danais juga menjadi prioritas pembangunan di kabupaten/kota.

Dalam laporannya, Sekda DIY Drs Benny Suharsono

MSI mengatakan, pemerintah pusat telah menetapkan pagu definitif Dana Keistimewaan DIY TA 2024 sebesar Rp 1,42 triliun.

Menurut Benny, berdasarkan hasil kesepakatan penilaian penyesuaian program dan kegiatan keistimewaan yang dilakukan pada 4 Desember 2023, maka rincian alokasi dana keistimewaan untuk Urusan Kelembagaan sebesar Rp 47,6 miliar, Urusan Kebudayaan Rp 1,07 triliun, Urusan Pertanahan Rp 35,3 miliar, dan Urusan Tata Ruang Rp 266,5 miliar.

"Rencana pelaksanaan dana keistimewaan akan terdistribusi di OPD DIY sebesar Rp 962,2 miliar atau 67,77 persen, OPD di kabupaten-kota Rp 362,2 miliar atau 22,98 persen dan kalurahan/kelurahan Rp 131,4 miliar atau 9,26 persen," kata Benny.

Sedangkan dana keistimewaan yang akan dilaksa-

* Bersambung hal 7 kol 1